
**Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam
menangani Penyandang Disabilitas Tahun 2025**

Yusniati Bruno¹
Fanley Pangemanan²
Gustaf Undap³

Email Korespondensi: yusniatienceng@gmail.com

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki hak setara namun masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Di Kota Manado, dari sekitar 302 penyandang disabilitas yang terdata, hanya sekitar 151 orang per tahun yang dapat dijangkau program bantuan daerah akibat keterbatasan anggaran dan kuota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi penanganan disabilitas berdasarkan Model RACE dari John E. Marston yang terdiri dari empat tahapan: Research (analisis situasi), Action (perencanaan), Communication (pelaksanaan), dan Evaluation (evaluasi). Data dikumpulkan melalui wawancara purposive terhadap lima informan yaitu Sekretaris Rehabilitasi Sosial, Staf Rehabilitasi Sosial, Pendamping Lapangan, dan dua penyandang disabilitas, serta didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi telah dilaksanakan secara sistematis: analisis situasi melalui pendataan kelurahan, verifikasi DataSen, dan asesmen lapangan; perencanaan program berbasis data dengan prioritas desil 1–4; pelaksanaan melalui penyaluran bantuan sosial, alat bantu (kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, buku huruf timbul), dan program usaha ekonomi produktif dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping lapangan; serta evaluasi melalui pemantauan lapangan dan laporan kegiatan. Meskipun program telah memberikan manfaat bagi penerima, implementasi belum optimal akibat keterbatasan anggaran, keakuratan data yang belum menyeluruh, keterlambatan penyaluran bantuan, dan jangkauan program yang belum merata. Penelitian merekomendasikan pemutakhiran data secara berkala, peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan sejahtera

Kata Kunci: Strategi, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), yang menegaskan prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat paradigma dari pendekatan belas kasihan (*charity-based*) menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dalam kerangka desentralisasi, kewenangan urusan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan lokal.

Di Tingkat provinsi, mekanisme perlindungan dan pemberdayaan juga diperkuat oleh peraturan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang Disabilitas, yang menjadi payung bagi kabupaten/kota untuk melakukan pendataan, penyusunan program, penganggaran, dan koordinasi pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Di Tingkat kota, pelaksanaan urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat kota manado, yang diatur struktur, tugas dan fungsinya melalui peraturan Wali Kota Manado Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata

kerja Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Peraturan ini menempatkan penanganan penyandang disabilitas sebagai salah satu ranah kerja (melalui bidang rehabilitasi sosial dan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas) serta menentukan tugas pokok dan fungsi dinas dalam Menyusun kebijakan dan melaksanakan layanan sosial.

Di Kota Manado, pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang perlindungan sosial, penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan kelompok rentan. Program penanganan penyandang disabilitas yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi sosial, pemberian bantuan sosial, pemberian alat bantu, serta pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif. Selain itu, terdapat dukungan dari program pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan layanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado diawali dengan pendataan melalui koordinasi antara kelurahan dan Dinas Sosial. Data tersebut kemudian diverifikasi menggunakan sistem Data Sosial Ekonomi Nasional (DataSen) yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Selanjutnya dilakukan asesmen oleh tenaga kesejahteraan sosial untuk memastikan ketepatan sasaran program. Bantuan yang diberikan antara lain berupa bantuan

sosial sekitar Rp2.000.000 per tahun, bantuan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, serta pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif.

Namun demikian pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data tahun 2025. Jumlah penyandang disabilitas yang dapat menerima bantuan daerah dibatasi oleh kuota anggaran sekitar 151 orang per tahun dari total sekitar 302 penyandang disabilitas yang terdata. Sistem penerima manfaat dilakukan secara bergiliran setiap tahun sehingga belum menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan penerima kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kapasitas program yang tersedia.

Selain itu, variasi jenis disabilitas seperti tunanetra, tunarungu, disabilitas fisik, keterbelakangan mental, dan autisme menunjukkan bahwa kebutuhan intervensi tidak bersifat homogen. Hal ini menuntut adanya strategi yang adaptif dan spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Keterbatasan anggaran, kurangnya

sumber daya, serta tantangan dalam proses asesmen dan pembinaan menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap data, khususnya terkait rincian anggaran program, juga menjadi kendala dalam penelitian ini. Data yang diperoleh hanya berupa dokumen perencanaan strategis (Renstra) tanpa disertai informasi anggaran yang rinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi dalam

pengelolaan program masih perlu ditingkatkan karena dapat mempengaruhi proses analisis dalam menilai efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi pelaksana utama dalam program penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat kota.

Fokus penelitian ini diarahkan pada strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam menangani penyandang disabilitas. Fokus tersebut disusun berdasarkan teori strategi dari Fred R. David, model RACE dari John E. Marston.

Adapun fokus penelitian meliputi:

1. Perumusan Strategi (Research & Action)
 - Analisis situasi dan pendataan penyandang disabilitas
 - Identifikasi kebutuhan dan penyusunan program
2. Pelaksanaan Strategi (Communication)
 - Implementasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan
 - Sosialisasi program dan koordinasi lintas sektor
3. Evaluasi Strategi (Evaluation)
 - Monitoring pelaksanaan program
 - Penilaian efektivitas dan perbaikan kebijakan
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Strategi
 - Komunikasi

- Sumber daya
- Disposisi aparatur
- Struktur birokrasi

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Analisis Situasi (Research)

Tahap pertama adalah analisis situasi, yaitu proses mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta kondisi yang terjadi di lapangan sebelum suatu program dilaksanakan. Tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kondisi nyata yang menjadi dasar penyusunan strategi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, analisis situasi dilakukan melalui pendataan oleh kelurahan, verifikasi oleh Dinas Sosial, serta asesmen oleh pendamping lapangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan, di antaranya keakuratan dan validitas data penyandang disabilitas yang belum optimal karena proses

pendataan masih bergantung pada data dari kelurahan, menunjukkan bahwa proses pendataan masih berpotensi belum sepenuhnya dilakukan secara langsung di lapangan karena hanya menerima data administratif. Selain itu, Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya keragaman kebutuhan penyandang disabilitas sejak tahap awal, dimana terdapat perbedaan kebutuhan seperti bantuan alat bantu, bantuan uang tunai, sembako, maupun bantuan usaha. Di sisi lain, terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu karena harus melalui proses pengusulan dan pengadaan terlebih dahulu yang bergantung pada ketersediaan anggaran. Selain itu, kurangnya pemahaman keluarga atau masyarakat dalam melaporkan kondisi disabilitas juga mempengaruhi kelengkapan data. Dengan demikian, tahap analisis situasi masih menghadapi kendala dalam hal keakuratan data, keragaman kebutuhan, serta proses pengusulan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tahap analisis situasi dalam penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado telah dilakukan melalui pendataan oleh kelurahan, verifikasi oleh Dinas Sosial, serta asesmen di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, yaitu keakuratan data yang belum sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada data dari kelurahan, adanya keragaman kebutuhan penyandang disabilitas seperti bantuan alat bantu, uang tunai, sembako, dan usaha, serta kendala dalam pemenuhan bantuan alat bantu yang harus melalui proses pengusulan dan bergantung pada ketersediaan

anggaran. Oleh karena itu, tahap analisis situasi masih perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program yang tepat sasaran.

2. Perencanaan (Planning)

Tahap kedua adalah perencanaan, yaitu menyusun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah ditemukan pada tahap analisis situasi. Perencanaan ini mencakup penentuan tujuan, sasaran program, serta strategi yang akan digunakan.

Setelah melakukan analisis situasi, Dinas Sosial kemudian menyusun perencanaan program berdasarkan data yang telah diperoleh. Perencanaan dilakukan dengan menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas seperti bantuan alat bantu, bantuan sosial, serta program pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif. Perencanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang telah diidentifikasi melalui proses asesmen sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, perencanaan program penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado dilakukan berdasarkan data hasil pendataan, verifikasi, serta asesmen lapangan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk penentuan jenis bantuan seperti bantuan alat bantu, bantuan sosial, serta bantuan usaha. Selain itu, dalam tahap perencanaan juga mempertimbangkan bentuk pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, seperti melalui program usaha ekonomi produktif dan bentuk pemberdayaan lainnya. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara

yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kemandirian. Oleh karena itu, program pemberdayaan direncanakan sebagai upaya agar penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Namun demikian, dalam tahap perencanaan masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan tidak semua kebutuhan penyandang disabilitas dapat diakomodasi dalam program yang direncanakan, sehingga Dinas Sosial harus melakukan prioritas dalam penentuan penerima bantuan. Selain itu, terdapat keragaman kebutuhan penyandang disabilitas, dimana sebagian membutuhkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sembako, maupun bantuan usaha, sehingga menjadi tantangan dalam menentukan jenis bantuan yang paling tepat. Di sisi lain, perencanaan bantuan alat bantu juga menghadapi kendala karena harus melalui proses pengusulan dan pengadaan terlebih dahulu, sehingga kebutuhan yang telah diidentifikasi tidak dapat langsung direalisasikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan program penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado telah dilakukan berdasarkan data yang ada serta mempertimbangkan aspek pemberdayaan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, keragaman kebutuhan, serta mekanisme pengusulan bantuan yang berdampak pada keterbatasan dan keterlambatan

realisasi program. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih optimal agar program yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas secara lebih efektif.

3. Pelaksanaan (Implementation)

Tahap ketiga adalah pelaksanaan, yaitu proses menjalankan program atau strategi yang telah direncanakan. Pada tahap ini dilakukan implementasi kegiatan serta penyampaian program kepada sasaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas yang telah terdata dan memenuhi kriteria penerima bantuan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial serta pendamping lapangan yang membantu proses penyaluran bantuan dan melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan berupa alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat tunanetra, serta bantuan usaha produktif bagi penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk berwirausaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan program penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado dilakukan melalui penyaluran bantuan kepada penerima yang telah terdata dan memenuhi kriteria. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping lapangan dalam proses penyaluran bantuan serta pendampingan kepada penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan sosial, bantuan alat bantu, serta bantuan usaha bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterlambatan dalam penyaluran bantuan, khususnya bantuan alat bantu, yang disebabkan oleh proses pengusulan dan pengadaan yang harus dilalui terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan bantuan tidak dapat langsung diterima oleh penyandang disabilitas meskipun kebutuhan telah diidentifikasi sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan program penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado dilakukan melalui penyaluran bantuan kepada penerima yang telah terdata dan memenuhi kriteria. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping lapangan dalam proses penyaluran bantuan serta pendampingan kepada penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan sosial, bantuan alat bantu, serta bantuan usaha bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya proses pengusulan dan pengadaan bantuan, khususnya alat bantu, yang menyebabkan bantuan tidak dapat langsung diberikan kepada penyandang disabilitas meskipun kebutuhan telah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu, terdapat keragaman kebutuhan penyandang disabilitas, dimana sebagian mengharapkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sembako, maupun bantuan usaha. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan program karena bantuan yang

diberikan harus menyesuaikan dengan jenis program yang tersedia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan program penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, namun masih menghadapi kendala dalam hal proses penyaluran bantuan yang memerlukan tahapan pengusulan dan pengadaan serta keragaman kebutuhan penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan program agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

4. Evaluasi (Evaluation)

Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana serta melihat dampak yang dihasilkan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan serta laporan dari tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping lapangan mengenai kondisi penerima bantuan. Melalui evaluasi ini, Dinas Sosial dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program seperti keterbatasan anggaran serta jumlah penyandang disabilitas yang masih belum dapat terjangkau oleh program bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, evaluasi program penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado dilakukan melalui pemantauan di lapangan serta laporan dari tenaga kesejahteraan sosial dan

pendamping lapangan terkait kondisi penerima bantuan. Melalui proses evaluasi tersebut, Dinas Sosial dapat mengetahui berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada terbatasnya jumlah penyandang disabilitas yang dapat menerima bantuan, sehingga belum seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Selain itu, terdapat pula ketentuan atau kriteria penerima bantuan yang harus dipenuhi, yang menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas dapat langsung memperoleh bantuan meskipun memiliki kebutuhan. Di sisi lain, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas dalam membantu memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa penerima bantuan merasa terbantu dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap evaluasi telah dilakukan melalui pemantauan dan laporan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan program serta kendala yang dihadapi. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan bantuan akibat keterbatasan anggaran dan kriteria penerima, sehingga program yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan program agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam menangani penyandang disabilitas telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategi yang meliputi analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap analisis situasi, pemerintah daerah melakukan pendataan dan identifikasi penyandang disabilitas melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan serta melakukan asesmen langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan. Tahap perencanaan dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah diverifikasi untuk menentukan bentuk program dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, program dilaksanakan melalui penyaluran berbagai bentuk bantuan seperti bantuan sosial, bantuan alat bantu, serta program pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan berbagai pihak seperti tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping lapangan. Sementara itu, pada tahap evaluasi pemerintah melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program guna mengetahui sejauh mana bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tahapan strategi yang dikemukakan oleh John E. Marston, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti

keterbatasan anggaran dan kuota bantuan yang tersedia..

Kesimpulan

Pada tahap perencanaan, program disusun berdasarkan data yang telah diverifikasi dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Program tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan seperti usaha ekonomi produktif. Namun, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi perencanaan sehingga belum semua kebutuhan dapat diakomodasi secara optimal.

Pada tahap pelaksanaan program telah dijalankan melalui pemberian bantuan sosial, alat bantu, serta kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping lapangan. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan rencana namun masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyakuran bantuan, keterbatasan jumlah penerima, serta belum meratanya jangkauan program.

Pada tahap evaluasi, Dinas Sosial telah melakukan pemantauan dan penilaian melalui laporan kegiatan serta pengawasan di lapangan. Program yang dilaksanakan dinilai telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Akan tetapi, evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kuota penerima, serta belum berkelanjutannya program pemberdayaan.

Secara keseluruhan, strategi penanganan penyandang disabilitas di Kota Manado telah dilaksanakan

secara sistematis dan berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan data, serta belum meratanya jangkauan program, sehingga diperlukan peningkatan pada setiap tahapan strategi agar pelaksanaan program dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Saran

Pada tahap perencanaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun program yang lebih komprehensif dengan memperhatikan keragaman kebutuhan penyandang disabilitas

serta meningkatkan alokasi anggaran agar program tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pada tahap pelaksanaan, diperlukan peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendamping lapangan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat waktu dan merata, serta memperluas jangkauan program agar lebih banyak penyandang disabilitas dapat menerima manfaat.

Pada tahap evaluasi, diharapkan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan dengan tidak hanya berfokus pada laporan administratif, tetapi juga pada dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas. Hasil evaluasi tersebut perlu dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan dan pengembangan program di masa yang akan datang agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Estiyanti, N. M., Pratiwi, P. S. A., Istriawati, N. K. A., & Ardyanti, A. A. P. (2021). Pembinaan soft skill dan hard skill penyandang disabilitas pada Yayasan Puspadi Bali. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(1), 96–101.
- Ginting, S., Darmayanti, T. E., Wianto, E., & Yuwono, A. A. (2025). Harapan dan kenyataan: Implementasi kurikulum pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri Kota Bandung. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 11(2), 9–18.
- Hutagalung, N. J. A. (2024). Upaya perlindungan hukum dalam hak pekerja difabel dalam bekerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(4), 515–518.
- Manopo, T. P., Singkoh, F., & Kasenda, V. (2021). Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi kasus di Kecamatan Langowan Timur). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Ramadhani, S. Z., Karim, Q., & Sari, N. D. (2025). PADU as a transformative pillar: Advancing inclusive access and skill development. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3).
- World Health Organization. (2022). *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. World Health Organization.

Buku

- Barnes, C., & Mercer, G. (2019). *Disability: Key Concepts*. London: Routledge.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. Cambridge, MA: MIT Press.
- David, F. R. (2017). *Strategic Management: Concepts and Cases*. Harlow: Pearson Education.
- Hoessein, B. (2016). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marston, J. E. (1963). *The Nature of Public Relations*. New York: McGraw-Hill.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, J. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2020). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.